TERM OF REFERENCE (TOR)
Procurement of IT Infrastructure Server for Supporting System Implementation

1. LATAR BELAKANG

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), melalui Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas), tengah melaksanakan inisiatif strategis Transformasi Digital Pengawasan (TDP) dalam kerangka proyek State Accountability Revitalization – Additional Financing (STAR-AF), yang didanai oleh Asian Development Bank (ADB) melalui Loan Agreement No. 3872-INO. Proyek ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas sektor publik di Indonesia melalui peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi.

Salah satu kerangka utama pelaksanaan TDP adalah pengembangan Sistem Pengawasan Terintegrasi Teknologi Informasi (SPTTI), yaitu *platform* digital pengawasan berbasis arsitektur mikro-layanan yang dirancang untuk mendukung proses pengawasan dari perencanaan hingga pelaporan. SPTTI mencakup tiga inovasi teknologi utama: (1) Kecerdasan Artifisial / Artificial Intelligence (AI) untuk automasi dan analitik cerdas, (2) Data-Driven Platform (DDP) untuk pengelolaan dan integrasi data pengawasan dalam skala besar, dan (3) Robotic Process Automation (RPA) untuk automasi proses audit yang berulang. Ketiga pendekatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas adaptif BPKP dalam melakukan pengawasan berbasis bukti (*evidence-based supervision*) yang lebih cepat, akurat, dan responsif.

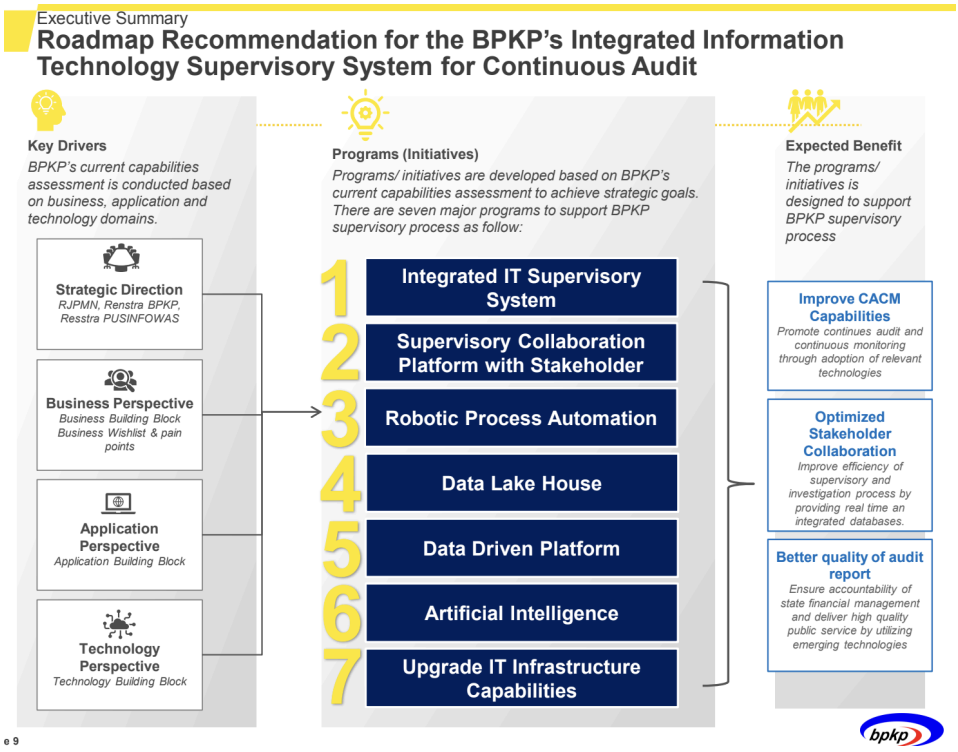

Gambar 1. Inisiatif SPTTI BPKP
Sumber: Laporan Rekomendasi dari EY untuk BPKP (2022)

Saat ini, sebagian besar fungsi pengawasan masih bersifat deskriptif dan retrospektif, berfokus pada pelaporan atas kejadian yang telah terjadi. Dengan dukungan teknologi seperti AI dan pemrosesan data cerdas, BPKP mendorong pergeseran paradigma menuju pengawasan yang prediktif, preskriptif, dan diagnostik, yang memungkinkan identifikasi risiko sebelum terjadi, rekomendasi tindakan berbasis pola data, serta analisis akar penyebab permasalahan secara otomatis. Infrastruktur yang mendukung transformasi ini harus mampu menangani volume data tinggi, melakukan pemrosesan paralel berbasis GPU, dan memungkinkan integrasi lintas sistem.

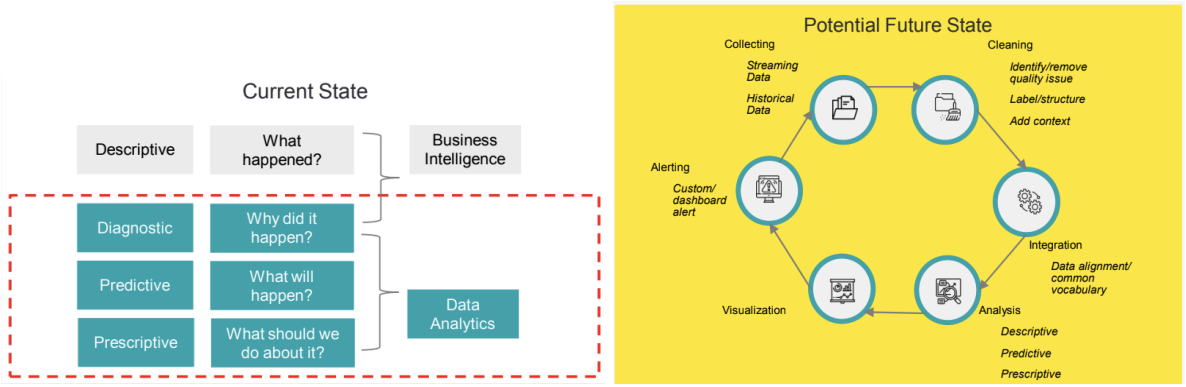

Gambar 2. Rencana Pengawasan Berbasis Data
Sumber: Laporan Rekomendasi dari EY untuk BPKP (2022)

Dalam pengembangan sistem SPTTI dan aplikasi pendukungnya, BPKP mengimplementasikan berbagai sistem pengawasan berbasis data (*data-driven supervision*), termasuk:

- **Sistem Manajemen Audit (SIMA),** sebagai *platform* manajemen proses pengawasan internal berbasis data yang mendukung otomatisasi perencanaan pengawasan, pelaksanaan, pelaporan, dan pelacakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- ***Sistem Continuous Audit Continuous Monitoring (CACM)***, yang memungkinkan analisis data keuangan dan transaksi secara *real-time* untuk mendeteksi anomali, *red flag*, dan potensi ketidakpatuhan.
- **Sistem Informasi Manajemen Risiko (RMIS)**, sebagai *platform* digital untuk mengintegrasikan, menilai, dan memvisualisasikan profil risiko entitas guna mendukung deteksi dini dan pengambilan keputusan pengawasan yang lebih efektif.

Untuk memperkuat analitik cerdas pada sistem-sistem tersebut, STAR-AF juga mengintegrasikan teknologi **Generative Artificial Intelligence (AI)** untuk menghasilkan ringkasan pengawasan/audit otomatis berbasis bahasa alami, mendukung interaksi pengguna melalui asisten AI, dan menyediakan *dashboard* adaptif. Penerapan sistem berbasis AI membutuhkan infrastruktur teknologi informasi yang andal, berskala besar, dan dapat diperluas (*scalable*). Secara khusus, pengadaan infrastruktur mencakup:

- **GPU Server**, yang diperlukan untuk menjalankan dan menyempurnakan model bahasa besar (*Large Language Model* / LLM) dan sistem pembelajaran mendalam lainnya yang mendukung fungsi AI generatif, deteksi anomali, serta alat bantu audit adaptif.
- **Server Hyperconverged Infrastructure (HCI),** untuk mendukung virtualisasi dan hosting lingkungan aplikasi seperti CACM dan RMIS secara fleksibel, aman, dan dapat diandalkan.
- **Knowledge Graph Server**, menjadi bagian dari HCI, untuk mendukung integrasi data semantik, pemetaan konteks antara program pemerintah dan risiko, serta mengimplementasikan metode *retrieval-augmented generation* (RAG) guna meningkatkan akurasi dan relevansi keluaran Generative AI.

Infrastruktur ini secara langsung mendukung Output 3 STAR-AF, yaitu Penguatan Pengawasan Publik Digital, dengan memungkinkan BPKP mengoperasionalkan sistem

digital canggih, meningkatkan pemanfaatan data, serta memperkuat responsivitas fungsi audit dan manajemen risiko. Selain itu, pengadaan ini juga mendukung inisiatif tata kelola data nasional, mengurangi latensi pada sistem kritikal, memungkinkan pemrosesan data sensitif secara aman di dalam negeri (*on-premise*), serta membangun fondasi inovasi berkelanjutan dalam pengawasan publik.

Data rencana kapasitas Pusinfowas menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terjadi peningkatan signifikan dalam volume transaksi harian dan penggunaan token AI, dengan total lebih dari 44 juta token digunakan untuk proses analitik dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Selain itu, kebutuhan *storage* aktif telah mencapai lebih dari 90 TB, menandakan bahwa permintaan terhadap komputasi dan penyimpanan skala besar akan terus meningkat.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan kebutuhan strategis, teknis, dan regulasi tersebut, maka pengadaan infrastruktur GPU Server, dan HCI Server menjadi sangat krusial sebagai langkah akseleratif dalam memastikan keberlanjutan pelaksanaan proyek STAR-AF serta sebagai fondasi sistem pengawasan modern BPKP. Penguatan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 300 tentang audit berbasis nilai dan efisiensi, serta mendukung praktik Supreme Audit Institution (SAI) yang berdaya saing sebagaimana dianjurkan dalam publikasi INTOSAI Journal of Science and Technology (2023).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dari pengadaan infrastruktur server ini adalah untuk menyediakan sistem komputasi yang andal, efisien, dan siap mendukung implementasi sistem berbasis *generative AI* dan aplikasi pengawasan digital yang sedang dikembangkan oleh BPKP dalam kerangka Proyek STAR-AF. Secara khusus, tujuan pengadaan ini meliputi:

1. Tersedianya perangkat keras GPU *Server* untuk mendukung proses komputasi intensif dalam pengembangan dan operasionalisasi sistem *Generative A*I di lingkungan BPKP.
2. Tersedianya perangkat keras Hyper-Converged Infrastructure (HCI) *Server* untuk mendukung kebutuhan *server*, *storage*, dan virtualisasi dalam satu kesatuan sistem yang terintegrasi.
3. Tersedianya *Knowledge Graph Server* sebagai infrastruktur semantik untuk pemetaan entitas, relasi data, dan pendukung fungsi *retrieval-augmented generation* (RAG) dalam aplikasi pengawasan.

4. Terintegrasinya seluruh perangkat yang diperoleh dari pengadaan ini dengan infrastruktur eksisting.
5. Terlaksananya proses instalasi, konfigurasi, dokumentasi teknis, serta pelatihan dasar kepada tim TI BPKP untuk memastikan perangkat siap digunakan dan dikelola secara mandiri.

3. SASARAN

Sasaran dari kegiatan pengadaan infrastruktur *server* ini adalah untuk mendukung secara langsung pelaksanaan transformasi digital pengawasan oleh BPKP dalam kerangka Proyek STAR-AF, khususnya pada **Output 3: Penguatan Pengawasan Publik Digital**. Infrastruktur ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komputasi tinggi, penyimpanan terintegrasi, dan pemrosesan semantik data yang krusial bagi operasionalisasi sistem berbasis AI dan pengawasan berbasis data (*data-driven supervision*).

Secara lebih rinci, sasaran pengguna (*target beneficiaries*) dari kegiatan ini meliputi:

1. **Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas) BPKP**, sebagai unit teknis utama yang akan mengelola dan mengoperasikan infrastruktur serta sistem aplikasi seperti CACM, *Generative AI*, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang ada di BPKP.
2. **Tim pengembang sistem pengawasan digital**, yang membutuhkan lingkungan komputasi yang andal untuk pelatihan model bahasa besar (LLM), integrasi data, dan *deployment* sistem.
3. **Seluruh unit kerja pengawasan BPKP**, baik pusat maupun perwakilan, sebagai *end-user* dari sistem pengawasan cerdas berbasis AI dan visualisasi risiko yang didukung oleh infrastruktur ini.
4. **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**, yang akan memperoleh manfaat dari *insight* analitik berbasis data dan respons audit yang lebih adaptif dan *real-time*.

4. PENERIMA MANFAAT

Pengadaan ini akan memberikan manfaat strategis dan operasional yang luas bagi berbagai pemangku kepentingan di lingkungan BPKP dan pemerintahan. Penerima manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan ini meliputi:

- **Presiden Republik Indonesia,** sebagai pemangku kepentingan utama BPKP, yang akan menerima manfaat dari penguatan pengawasan strategis berbasis data untuk

mendukung efektivitas pengendalian pembangunan nasional dan pengelolaan keuangan negara secara lebih transparan dan akuntabel.

- **Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah**, sebagai penerima manfaat strategis dari output pengawasan yang lebih prediktif, preskriptif, dan responsif, untuk mendukung pengambilan keputusan dan mitigasi risiko kebijakan secara lebih dini.
- **Seluruh Unit Kerja Pengawasan BPKP**, termasuk di kantor pusat dan perwakilan, yang akan menjadi pengguna akhir dari sistem berbasis Generative AI dan visualisasi risiko berbasis data yang dibangun di atas infrastruktur ini.
- **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)** di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun BUMN/BUMD, yang akan mendapatkan manfaat dari hasil analitik dan insight yang lebih tajam, cepat, dan relevan melalui *dashboard*, rekomendasi preskriptif, serta pelaporan otomatis.
- **Masyarakat dan pemangku kepentingan eksternal**, sebagai pihak akhir yang akan memperoleh manfaat dari meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara melalui pengawasan berbasis teknologi canggih yang didukung oleh infrastruktur ini.
- **Tim Pengembang Sistem Pengawasan Digital**, baik internal maupun mitra konsultan, yang memerlukan lingkungan komputasi berkinerja tinggi untuk melatih model bahasa besar (LLM), melakukan integrasi data lintas sistem, dan melakukan *deployment* sistem seperti CACM, SIMA, RMIS, maupun aplikasi tematik pengawasan lainnya.

5. LOKASI KEGIATAN

Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jl. Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur.

6. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan yang harus dilakukan oleh penyedia adalah sebagai berikut meliputi:

1. Pengadaan GPU Server.
2. Pengadaan unit HCI Server.
3. Pengadaan Knowledge Graph Server.
4. Pelaksanaan proses instalasi dan konfigurasi awal seluruh perangkat sesuai kebutuhan operasional dan keamanan sistem BPKP;

5. Integrasi perangkat dengan infrastruktur dan sistem aplikasi eksisting, termasuk pengujian integrasi dan kesiapan operasional;
6. Penyusunan dokumentasi teknis mencakup spesifikasi akhir, konfigurasi sistem, prosedur operasional standar (SOP), serta panduan pemeliharaan dasar;
7. Pemberian pelatihan teknis dasar dan ujian sertifikasi kepada 6 personel teknis Pusat Informasi Pengawasan (Pusinfowas) BPKP terkait penggunaan dan pemeliharaan sistem yang terpasang;
8. Penyediaan layanan dukungan teknis dan pemeliharaan (maintenance) selama minimal 12 (dua belas) bulan sejak serah terima barang.

7. SPESIFIKASI TEKNIS KEBUTUHAN PERANGKAT KERAS TIK

No	Nama Perangkat	Jumlah	Penjelasan Fungsi dan Pemanfaatan Layanan	Spesifikasi Teknis
1	GPU Server	1 Perangkat		1. 6 (enam) node server fisik berbasis x86, rack-mountable (2U atau 4U) 2. Masing-masing node memiliki spesifikasi umum minimal sebagai berikut: - CPU: Minimal 24 core fisik (Intel Xeon / AMD EPYC kelas enterprise) - RAM: Minimal 512 GB ECC DDR4/DDR5 - Storage: Minimal 4 TB SSD NVMe (RAID-ready) - Jaringan: Minimal 2 port 10GbE per node 3. Masing-masing node memiliki spesifikasi GPU minimal sebagai berikut: - Terdapat minimal 1 unit GPU NVIDIA L40s per node - GPU Architecture: NVIDIA Ada Lovelace - GPU Memory: 48 GB GDDR6 with ECC - Memory Bandwidth: 864 GB/s - CUDA Cores: 18.176 - Tensor Cores: 568 - Interface: PCIe Gen4 x16, 64 GB/s bidirectional 4. Mendukung fitur High Availability (HA) dan failover mechanism baik pada tingkat hardware maupun

No	Nama Perangkat	Jumlah	Penjelasan Fungsi dan Pemanfaatan Layanan	Spesifikasi Teknis
				software. 5. Memiliki Redundant power supply dan sistem pendingin aktif untuk operasi 24/7. 6. Dukungan pengelolaan jarak jauh (IPMI, BMC, atau setara). 7. Monitoring suhu, kinerja GPU, dan status perangkat secara real-time. 8. Mendukung virtualisasi dan container orchestration (Docker, Kubernetes). 9. Mendukung framework AI umum seperti TensorFlow, PyTorch, ONNX, Hugging Face Transformers, dan sejenisnya.
2	Hyper-Converged Server	1 Perangkat		1. Hyper-Converged System enterprise berbasis x86 yang mengintegrasikan komputasi, penyimpanan, dan virtualisasi dalam satu sistem. 2. Terdiri dari 2 (dua) unit node HCI, dengan konfigurasi sebagai berikut: - CPU: Minimal 32 core fisik per node. - RAM: Minimal 256 GB ECC DDR4/DDR5. - Storage Internal: Kombinasi SSD dan HDD dalam arsitektur HCI (contoh: vSAN, Nutanix AOS, atau setara). 3. Mendukung multi-hypervisor seperti VMware vSphere/ESXi, Microsoft Hyper-V, dan KVM. 4. Mendukung fitur high availability (HA) dan live migration antar virtual machine (VM) dalam cluster. 5. Mendukung pemantauan performa, penggunaan sumber daya, pelaporan otomatis, serta upgrade perangkat lunak tanpa downtime. 6. Masing-masing node dilengkapi dengan minimal 2 port jaringan 10GbE dan siap terhubung ke Top-of-Rack Switch eksisting. 7. Mendukung integrasi dengan cloud hyperscaler seperti

No	Nama Perangkat	Jumlah	Penjelasan Fungsi dan Pemanfaatan Layanan	Spesifikasi Teknis
				AWS, Azure, dan GCP. 8. Mampu di-scale-out secara horizontal tanpa interupsi layanan. 9. Dilengkapi fitur keamanan terpadu, termasuk: - Data at rest encryption - Role-based access control - Cluster lock - Native Key Management 10. Termasuk lisensi perangkat lunak HCI untuk virtualisasi dan manajemen sistem selama minimal 5 (lima) tahun.

8. INFRASTRUKTUR MODEL

Kerangka kerja yang menggambarkan keterkaitan infrastruktur yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan layanan dan proses bisnis pemerintah secara digital, secara garis besar disajikan sebagai berikut:

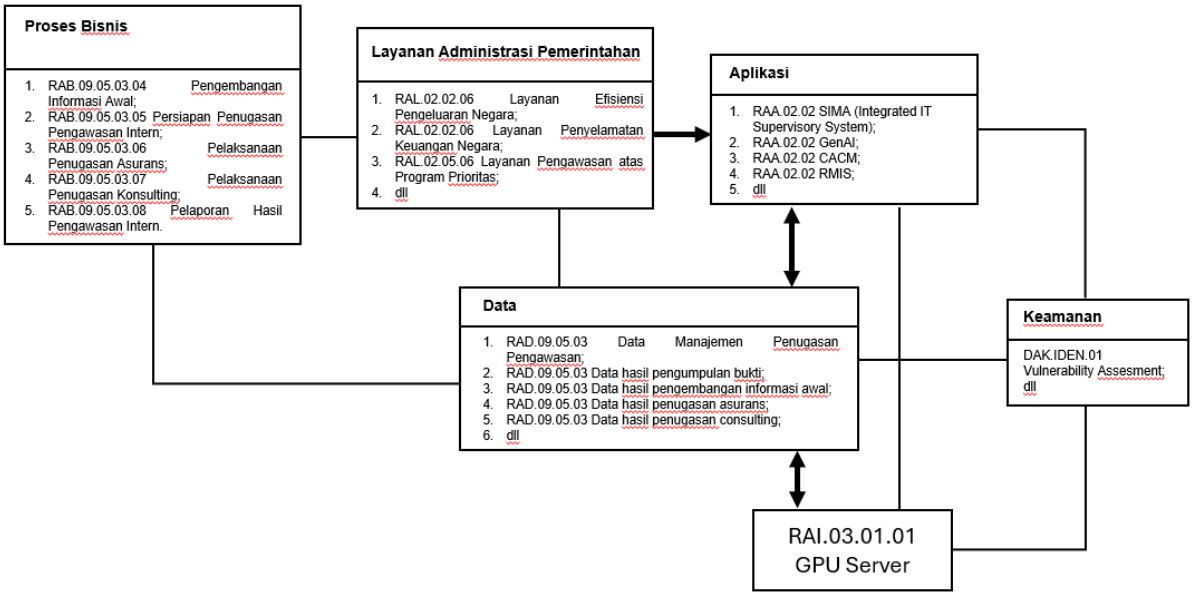

Secara detil, keterkaitan antar domain dapat dilihat pada Lampiran dan Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE.

9. KELUARAN

Keluaran utama dari kegiatan pengadaan infrastruktur ini adalah tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang siap operasional dan mendukung langsung implementasi sistem pengawasan digital berbasis data dan AI di lingkungan BPKP. Keluaran ini mencakup aspek teknis, fungsional, dan peningkatan kapabilitas institusi, dengan rincian sebagai berikut:

- **Tersedianya GPU Server** yang dapat digunakan untuk mendukung proses pelatihan dan inferensi model AI, termasuk *Large Language Model* (LLM), yang digunakan dalam pengembangan Generative AI, deteksi anomali transaksi, serta asisten audit berbasis *Natural Language Processing* (NLP).
- **Tersedianya Hyperconverged Infrastructure (HCI) Server** untuk mendukung *hosting*, virtualisasi, dan orkestrasi layanan aplikasi digital pengawasan seperti CACM, SIMA, dan RMIS secara fleksibel dan terintegrasi dengan sistem eksisting.
- **Tersedianya Knowledge Graph Server** yang mampu mendukung pemetaan semantik, integrasi data antar entitas, serta penerapan teknologi *retrieval-augmented generation* (RAG) untuk meningkatkan relevansi analisis dan respons sistem berbasis AI.
- **Seluruh perangkat terpasang, terkonfigurasi, dan terintegrasi** dengan lingkungan operasional Pusinfowas sesuai standar keamanan, efisiensi, dan kinerja tinggi.
- **Tersusunnya dokumentasi teknis lengkap**, meliputi spesifikasi akhir perangkat, konfigurasi sistem, SOP operasional, panduan pemeliharaan, serta arsip konfigurasi untuk kebutuhan audit dan pengembangan lanjutan.
- **Terlaksananya pelatihan teknis dasar bagi tim TI** BPKP, khususnya personel dari Pusinfowas, untuk memastikan kemampuan pengoperasian dan pemeliharaan mandiri terhadap perangkat yang diadakan.
- **Terselenggaranya layanan dukungan teknis dan pemeliharaan perangkat** selama periode minimal 12 bulan untuk menjamin stabilitas, keandalan, dan keberlanjutan fungsi infrastruktur.

Secara keseluruhan, keluaran dari kegiatan ini akan memperkuat kesiapan infrastruktur BPKP dalam mendukung visi pengawasan publik yang modern, adaptif, dan berbasis kecerdasan artifisial sebagaimana dituliskan dalam Output 3 proyek STAR-AF.

10. TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

#	Tahapan	2025								2026							...
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	...
1	Perencanaan dan penyusunan KAK																
2	Proses pengadaan																
3	Tanda tangan kontrak																
4	Perakitan dan pengiriman																
5	Instalasi dan implementasi																
6	Testing, Training, TOK																
7	Dukungan dan garansi																

11. ANALISIS BIAYA MANFAAT

12. RENCANA ANGGARAN BIAYA

No	Description	Amount	Volume		Total
1	GPU Server (6 Node) – 24 core CPU, 512 GB RAM, 4 TB SSD NVMe – GPU NVIDIA L40s (48 GB VRAM) per node	3.720.000.000	6	Unit	22.320.000.000
2	HCI Server (6 node) – 32 core CPU, 256 GB RAM – Hybrid SSD + HDD storage	3.000.000.000	4	Unit	12.000.000.000
3	Knowledge Graph Server Cluster (8 node) – 40 core CPU, 256 GB RAM – 2 TB SSD per node – Cluster-ready, API & security layer	1.535.000.000	8	Unit	12.280.000.000
	TOTAL				**46.600.000.000**

13. LAMPIRAN

Tabel keterkaitan infrastruktur dengan domain lainnya

Komponen/ Infrastruktur	Proses Bisnis BPKP	ID Probis	Proses Bisnis (SIA SPBE)	ID Layanan	Layanan	Data	Aplikasi
GPU Server	BPKP-07 Perencanaan Pengawasan Intern	RAB.09.05.03.04	Pengembangan Informasi Awal	RAL.02.02.06 Pengelolaan Kekayaan Negara	Layanan peningkatan potensi penerimaan negara (D1)	Batasan Tanggung Jawab BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	GenAI
	BPKP-08 Pelaksanaan Pengawasan Intern	RAB.09.05.03.05	Persiapan Penugasan Pengawasan Intern	RAL.02.02.06 Pengelolaan Kekayaan Negara	Layanan Efisiensi Pengeluaran Negara (D1)	Program Kerja Penugasan Pengawasan Intern Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	SIMA (Integrated IT Supervisory System)
		RAB.09.05.03.06	Pelaksanaan Penugasan Asurans	RAL.02.02.06 Pengelolaan Kekayaan Negara	Layanan Penyelamatan Keuangan Negara (D1)	Surat Tugas Pengawasan Intern Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	CACM
		RAB.09.05.03.07	Pelaksanaan Penugasan Konsultansi	RAL.02.05.06 Pengendalian Program Prioritas Nasional	Layanan Pengawasan atas Program Prioritas (D1)	Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	RMIS
		RAB.09.05.03.08	Pelaporan Hasil Pengawasan Intern	RAL.02.05.06 Pengendalian Program Prioritas Nasional	Layanan Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (D1)	Hasil Pengumpulan Bukti Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	
		RAB.09.05.03.04		RAL.02.05.06 Pengendalian Program Prioritas Nasional	Layanan Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategik (D1)	Hasil Penugasan Asurans (Simpulan, Area of Improvement, Rekomendasi, dan	

Komponen/ Infrastruktur	Proses Bisnis BPKP	ID Probis	Proses Bisnis (SIA SPBE)	ID Layanan	Layanan	Data	Aplikasi
						Action Plan) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	
		RAB.09.05.03.05		RAL.02.05.06 Pengendalian Program Prioritas Nasional	Layanan Pengawasan atas Proyek Strategis Nasional (D1)	Hasil Penugasan Konsultasi Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	
				RAL.02.04.03 Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	Layanan Kapabilitas APIP K/L (D1)	Hasil Analisis Lanjutan Informasi Hasil Pengawasan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	
				RAL.02.03.03 Pengendalian Pembangunan	Layanan Maturitas SPIP K/L (D1)	Laporan Hasil Penugasan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	
				RAL.02.03.03 Pengendalian Pembangunan	Layanan Manajemen Risiko K/L (D1)	Hasil Penelitian Awal Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	
				RAL.02.04.04 Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan, dan Akuntabilitas Kinerja	Layanan Perencanaan Program Pengawasan di Kedeputian BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (D1)	Hasil Pengembangan Informasi Awal Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	
				RAL.02.03.03 Pengendalian Pembangunan	Layanan Efisiensi Pengeluaran Negara (D2)	Surat Penolakan Penugasan Bidang Politik, Hukum,	

Komponen/ Infrastruktur	Proses Bisnis BPKP	ID Probis	Proses Bisnis (SIA SPBE)	ID Layanan	Layanan	Data	Aplikasi
						Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	
				RAL.02.03.03 Pengendalian Pembangunan	Layanan Penyelamatan Keuangan Negara (D2)	Batasan Tanggung Jawab BPKP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	
				RAL.02.05.06 Pengendalian Program Prioritas Nasional	Layanan Pengawasan atas Program Prioritas (D2)	Program Kerja Penugasan Pengawasan Intern Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	
				RAL.02.05.06 Pengendalian Program Prioritas Nasional	Layanan Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (D2)	Surat Tugas Pengawasan Intern Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	
				RAL.02.05.06 Pengendalian Program Prioritas Nasional	Layanan Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategik (D2)	Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan	

Komponen/ Infrastruktur	Proses Bisnis BPKP	ID Probis	Proses Bisnis (SIA SPBE)	ID Layanan	Layanan	Data	Aplikasi
						Kebudayaan	
				RAL.02.03.03 Pengendalian Pembangunan	Layanan Pengawasan atas Proyek Strategis Nasional (D2)	Hasil Pengumpulan Bukti Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	
				RAL.02.04.03 Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	Layanan Kapabilitas APIP K/L (D2)	Hasil Penugasan Asurans (Simpulan, Area of Improvement, Rekomendasi, dan Action Plan) Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	
				RAL.02.03.03 Pengendalian Pembangunan	Layanan Maturitas SPIP K/L (D2)	Hasil Penugasan Konsultasi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	
			Pengembangan Informasi Awal	RAL.02.02.06 Pengelolaan Kekayaan Negara	Layanan peningkatan potensi penerimaan negara (D1)	Batasan Tanggung Jawab BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	GenAI
			Persiapan Penugasan Pengawasan Intern	RAL.02.02.06 Pengelolaan Kekayaan Negara	Layanan Efisiensi Pengeluaran Negara (D1)	Program Kerja Penugasan Pengawasan Intern Bidang Perekonomian dan	SIMA (Integrated IT Supervisory System)

Komponen/ Infrastruktur	Proses Bisnis BPKP	ID Probis	Proses Bisnis (SIA SPBE)	ID Layanan	Layanan	Data	Aplikasi
						Kemaritiman	
			Pelaksanaan Penugasan Asurans	RAL.02.02.06 Pengelolaan Kekayaan Negara	Layanan Penyelamatan Keuangan Negara (D1)	Surat Tugas Pengawasan Intern Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	CACM
			Pelaksanaan Penugasan Konsultansi	RAL.02.05.06 Pengendalian Program Prioritas Nasional	Layanan Pengawasan atas Program Prioritas (D1)	Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	RMIS
			Pelaporan Hasil Pengawasan Intern	RAL.02.05.06 Pengendalian Program Prioritas Nasional	Layanan Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (D1)	Hasil Pengumpulan Bukti Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	
				RAL.02.05.06 Pengendalian Program Prioritas Nasional	Layanan Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategik (D1)	Hasil Penugasan Asurans (Simpulan, Area of Improvement, Rekomendasi, dan Action Plan) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	
				RAL.02.05.06 Pengendalian Program Prioritas Nasional	Layanan Pengawasan atas Proyek Strategis Nasional (D1)	Hasil Penugasan Konsultasi Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	
				RAL.02.04.03 Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	Layanan Kapabilitas APIP K/L (D1)	Hasil Analisis Lanjutan Informasi Hasil Pengawasan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	
				RAL.02.03.03 Pengendalian	Layanan Maturitas SPIP K/L (D1)	Laporan Hasil Penugasan Bidang	

Komponen/ Infrastruktur	Proses Bisnis BPKP	ID Probis	Proses Bisnis (SIA SPBE)	ID Layanan	Layanan	Data	Aplikasi
				Pembangunan		Perekonomian dan Kemaritiman	
				RAL.02.03.03 Pengendalian Pembangunan	Layanan Manajemen Risiko K/L (D1)	Hasil Penelitian Awal Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	
				RAL.02.04.04 Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Pengawasan, dan Akuntabilitas Kinerja	Layanan Perencanaan Program Pengawasan di Kedeputian BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (D1)	Hasil Pengembangan Informasi Awal Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	
				RAL.02.03.03 Pengendalian Pembangunan	Layanan Efisiensi Pengeluaran Negara (D2)	Surat Penolakan Penugasan Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	
				RAL.02.03.03 Pengendalian Pembangunan	Layanan Penyelamatan Keuangan Negara (D2)	Batasan Tanggung Jawab BPKP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	
				RAL.02.05.06 Pengendalian Program Prioritas	Layanan Pengawasan atas Program Prioritas	Program Kerja Penugasan Pengawasan Intern	

Komponen/ Infrastruktur	Proses Bisnis BPKP	ID Probis	Proses Bisnis (SIA SPBE)	ID Layanan	Layanan	Data	Aplikasi
				Nasional	(D2)	Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	
				RAL.02.05.06 Pengendalian Program Prioritas Nasional	Layanan Pengawasan atas Kegiatan Prioritas (D2)	Surat Tugas Pengawasan Intern Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	
				RAL.02.05.06 Pengendalian Program Prioritas Nasional	Layanan Pengawasan atas Proyek Prioritas Strategik (D2)	Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	
				RAL.02.03.03 Pengendalian Pembangunan	Layanan Pengawasan atas Proyek Strategis Nasional (D2)	Hasil Pengumpulan Bukti Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	
				RAL.02.04.03 Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	Layanan Kapabilitas APIP K/L (D2)	Hasil Penugasan Asurans (Simpulan, Area of Improvement, Rekomendasi, dan Action Plan) Bidang Politik, Hukum,	

Komponen/ Infrastruktur	Proses Bisnis BPKP	ID Probis	Proses Bisnis (SIA SPBE)	ID Layanan	Layanan	Data	Aplikasi
						Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	
				RAL.02.03.03 Pengendalian Pembangunan	Layanan Maturitas SPIP K/L (D2)	Hasil Penugasan Konsultasi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	
			Pengembangan Informasi Awal	RAL.02.02.06 Pengelolaan Kekayaan Negara	Layanan peningkatan potensi penerimaan negara (D1)	Batasan Tanggung Jawab BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	GenAI
			Persiapan Penugasan Pengawasan Intern	RAL.02.02.06 Pengelolaan Kekayaan Negara	Layanan Efisiensi Pengeluaran Negara (D1)	Program Kerja Penugasan Pengawasan Intern Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	SIMA (Integrated IT Supervisory System)